BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan kerja praktek yang dilaksanakan kurang lebih selama satu bulan, penulis di tempatkan pada bagian Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) khususnya di bagian Akuntansi. Dalam pelaksanaan kerja praktek tersebut, penulis di berikan pengarahan mengenai Tugas Pokok Instansi yang dibagi atas beberapa orang di dalamnya ,di berikan penjelasan mengenai bagaimana pencatatan yang diterapkan pada pemerintahan serta di berikan pembelajaran dan penerapan secara praktik seperti halnya menginputkan data dari masing-masing kantor dan dinas-dinas terkait ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA).

3.1.1 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2008 : 5) menyatakan bahwa :

"Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara berulang – ulang".

Menurut Azhar Susanto (2006:198) menyatakan bahwa :

" Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama".

Menurut M. Nafarin (2007:3) menyatakan bahwa :

“ Prosedur merupakan suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam”**.**

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah kegiatan yang ditetapkan untuk menjamin penanganan dan keseragaman kerja.

3.1.2 Pengertian Penyusunan

Menurut **Ardios (2006 : 315)** mengemukakan bahwa pengertian penyusunan yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sebagai berikut : ”Kata penyusunan berasal dari kata dasar susun yang artinya kelompok atau kumpulan yang tidak beberapa banyak.

Sedangkan menurut **M. Narafin (2009 8-9)** mengemukakan bahwa penyusunan adalah suatu kegiatan untuk memproses data – data yang di lakukan oleh suatu organisasi perusahaan atau perorangan secara baik dan teratur.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan kegiatan memproses data – data oleh perorangan atau kelompok atau kumpulan di dalam suatu organisasi perusahaan yang di lakukan secara baik dan teratur.

3.1.3 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut **Jhon J.Wild (2005:83)**, yaitu : “Produk proses pelaporan keuangan yang diatur oleh standar dan aturan akuntansi, insentif manajer, serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasan perusahaan”.

Sedangkan Laporan keuangan Menurut **Sofya Syafri Haraphap (2009:1)** adalah: “Media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu bentuk media informasi yang diatur oleh standar dan aturan akuntansi dalam proses pelaporan keuangan untuk pengawasan perusahaan.

3.1.4 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Definisi laporan realisasi anggaran menurut **Indra Bastian (2007:387)**, yaitu: “Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan dalam APBD diawal periode dengan jumlah yang telah direalisasikan dalam APBD diakhir periode”.

Sedangkan menurut **Dedi Nordiawan (2007:273)**, adalah: “laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu periode”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan yang dibuat untuk menggambarkan selisih yang di anggarkan mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu periode.

3.2 Teknik Pelaksanaan Kerja Praktek

3.2.1 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan yang di laksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengelola beberapa jenis transaksi yang memiliki fungsi *Akuntansi*. Jenis transaksinya meliputi: Pendapatan Dana Perimbangan, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga, termasuk transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan utang jangka panjang.

Berdasarkan fungsi akuntansi, maka prosedur ini meliputi:

1. Akuntansi Pendapatan (Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya)

Pada bagian ini yang dimaksud dengan akuntansi pendapatan di perlakuan sesuai dengan proses akuntansi yang di berlakukan pada :

a. Surat tanda bukti transfer pembayaran (Nota Kredit Bank)

b. Laporan Posisi Kas Harian Bank

diposting ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan kode rekening pendapatan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

2. Akuntansi Belanja (belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga)

Pada bagian ini menjelaskan yang dimaksud Akuntansi Belanja dilaksanakan sesuai proses akuntansi untuk Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Dokumen sumber yang digunakan :

1. Belanja Bunga : SP2D LS, Nota debet bank,
2. Belanja Subsidi : SP2D LS, Nota debet bank,
3. Belanja Hibah : SP2D LS, Nota debet bank,
4. Belanja Bantuan Sosial : SP2D LS,
5. Belanja Bagi Hasil : SP2D LS,

6. Belanja Bantuan Keuangan : SP2D LS,
7. Belanja Tidak Terduga : SP2D LS,

diposting ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan kode rekening pendapatan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

3. Akuntansi Pembiayaan (Penerimaan dan Pengeluaran Pembiyaan)

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan pemerintah yang mempunyai dampak terhadap penerimaan dan/atau pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sedangkan tujuan dari transaksi ini adalah untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran.Selisih dari kedua transaksi tersebut merupakan pembiayaan neto. Transaksi ini terbagi atas :

1. Prosedur akuntansi penerimaan kas

   Penerimaan kas yaitu memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen surat ketetapan pajak daerah/surat ketetapan retribusi daerah yang diterima dari Pengguna Anggaran. Setelah diverifikasi, Bendahara Penerimaan akan menerbitkan surat tanda bukti pembayaran dan surat tanda setoran yang sah serta menyerahkan Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang sah tersebut kepada wajib pajak/wajib retribusi daerah. Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan kemudian setiap akhir taun periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran kas terdiri atas 4 sub sistem yaitu:

A. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Pembebanan Uang Persediaan (UP), Prosedur Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pembebanan UP, terdiri atas:

- Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD**)**
- Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM)
- Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Penerbitan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

B. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Pembebanan Ganti Uang Persediaan (GU)

Prosedur Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pembebanan GU, terdiri atas:

- Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
- Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- Penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM)
- Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Penerbitan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

C. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Pembebanan Tambahan Uang Persediaan (TU).

- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran SKPD.

D. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Pembebanan Langsung (LS). Prosedur Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas, terdiri atas:

- Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
- Penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM)
- Penerbitan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
- Penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD)

4. Akuntansi Rekening PPKD di SKPD dan Rekening SKPD di PPKD

Akuntansi RK-SKPD merupakan akuntansi Aset Lancar di tingkat **PPKD**. Akun "RK-SKPD" akan bertambah bila PPKD mentransfer aset (seperti menerbitkan SP2D-UP, SP2D-GU dan SP2D-LS, atau menerima aset tetap dari Pemerintah Daerah).

5. Akuntansi Aset (Investasi Jangka Panjang)

Prosedur akuntansi aset pada SKPKD merupakan pencatatan atas pengakuan aset yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, misalnya pengakuan atas investasi jangka panjang. Aset terbagi ke dalam dua kelompok, yakni:

1. Aset Lancar (*Current Asset*); dan
2. Aset Tidak Lancar (*Non-Current Asset*)

6. Akuntansi Utang

Prosedur akuntansi utang pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) merupakan pencatatan atas pengakuan hutang jangka panjang yang muncul dari transaksi pengeluaran pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

7. Akuntansi Ekuitas Dana

Akuntansi atas ekuitas dana terjadi bersamaan terutama dengan akuntansi atas transaksi pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran), serta penyesuaian karena sebenarnya perubahan yang terjadi pada saldo ekuitas dana, disebabkan oleh transaksi-transaksi tersebut serta penyesuaian di akhir periode akuntansi. Ekuitas Dana terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a. Ekuitas Dana Lancar, terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan anggaran (SiLPA).
b. Ekuitas Dana Investasi, terdiri dari Diinvestasikan dana dalam Investasi jangka Panjang,
c. Ekuitas Dana Cadangan, terdiri atas Diinvestasikan dalam Dana Cadangan.

8. Laporan Keuangan

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan yang dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah selanjutnya secara periodik diposting ke dalam buku besar. Saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal berikutnya.

3.2.2 Prosedur Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari pendapatan dan belanja, dengan melihat selisih antara anggaran dan realisasinya; rasio-rasio antar-rekening, misalnya rasio total belanja terhadap total pendapatan, belanja langsung terhadap belanja tidak langsung, belanja langsung terhadap total pendapatan, belanja langsung.

Laporan realiasasi semester pertama disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang kemudian disusun sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Laporan keuangan terdiri dari :

a. Laporan realisasi anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari pendapatan dan belanja, dan realisasi atas anggaran.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

c. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi mengenai berbagai hal yang tidak “terbaca” dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Analisis Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Analisa yang di peroleh pada penyusunan laporan keuangan yang di buat oleh Pemerintah daerah terlihat sudah tepat berdasarkan prosedurnya yang sudah sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang sudah diterapkan untuk Pemerintah daerah, namun pada penyusunan laporan keuangan ini para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih kurang memahami bagaimana prosedur yang sesuai dengan Pemerintah daerah karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah.

3.3.2 Analisis Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Analisa yang diperoleh mengenai laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sudah tepat dan baik karena melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah sehingga tidak ada selisih dalam pencatatan realisasinya hanya saja ketidaktertibaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak melaksanakan rekonsiliasi tepat waktu dan rutin menyebabkan penundaan penyusunan laporan keuangan dan laporan realisasi anggaran oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sampai dengan kegiatan rekonsiliasi selesai dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD).